



Memudahkan Bendahara, Harus Selektif Memilih Toko

JOGJA—Pemberlakuan sistem transaksi nontunai di sekolah negeri menimbulkan reaksi beragam dari pihak sekolah. Sistem itu dinilai akan memudahkan bendahara karena tidak dipusingkan mengurus uang tunai, di sisi lain sekolah harus selektif memilih penyedia barang atau toko yang melayani nontunai.

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

Kepala SDN Giwangan, Siyam Mardini, menjelaskan pihaknya tentu harus mengedepankan komunikasi dengan penyedia barang atau jasa agar bersedia dibayar melalui transfer rekening. Karena ada beberapa penyedia yang ingin dibayar secara tunai, terutama jika sosialisasi belum dilakukan menyeluruh karena ada yang penyedia barang atau jasa yang belum memahami. "Takutnya toko mungkin ada yang tidak mau dengan cara nontunai, kalau sosialisasi belum maksimal, artinya mungkin beberapa toko belum tahu, loh kok bayarnya nontunai," ungkapnya kepada *Harian Jogja*, Jumat (3/11).

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Jogja, Edy Heri Suasana, menyatakan sistem nontunai mulai diterapkan di sekolah-sekolah pada pekan kedua bulan November 2017, terutama untuk penggunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) atau Biaya

Operasional Daerah (Bosda). Disdik akan mendampingi sekolah saat proses transaksi, untuk sekolah yang mengalami kesulitan, dinas terbuka memberikan bantuan.

Aturan ini akan diberlakukan bagi sekolah dari tingkatan TK, SD dan SMP Negeri di Kota Jogja yang sumber dananya murni dari pemerintah. Mengingat implementasi transaksi nontunai mulai diatur dalam Surat Edaran Kemendagri No. 910/1867/SJ, bahwa transaksi nontunai dilakukan paling lambat per 1 Januari 2018.

Siyam Mardini menegaskan siap mengikuti aturan tersebut. Beberapa guru juga telah membuka rekening baru baik guru PNS maupun honorer karena untuk belanja pegawai seringkali berbeda transfer, ada yang menggunakan Bank BPD dan Bank Jogja. Apalagi, sekolahnya telah ditetapkan sebagai terbaik nasional untuk urusan tata kelola BOS, sehingga harus memberikan contoh yang terbaik.

Namun, Mardini menilai sistem nontunai sebenarnya sangat memudahkan. Karena bendahara sekolah tidak harus bingung membawa uang tunai untuk melakukan pembayaran. Ia meyakini ketika nontunai menjadi kebiasaan sistem yang diterapkan

di sekolah, maka akan berjalan lancar. "Kalau model nontunai, bendahara tidak perlu membawa uang, hanya membawa sedikit yang akan dipakai transaksi tunai di bawah Rp500.000. Terus terang bendahara saya merasa senang dengan aturan itu, karena nggak pusing bawa tunai," jelasnya.

Ia menyarankan agar dinas dapat memaklumi setiap sekolah ketika awal penerapan terjadi beberapa kesalahan karena termasuk hal yang baru. Selain itu, karena penerapan itu juga di dinas lain, ia berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja bisa memfasilitasi untuk menyosialisasikan kepada toko atau penyedia barang atau jasa. Proses itu tidak harus dilakukan dengan cara mengumpulkan penyedia barang atau jasa, tetapi cukup dengan surat edaran atau pemberitahuan massal.

"Karena kalau penyedia barang jasa tidak bisa menyesuaikan, kan tidak laku juga jadinya, kasihan juga. Kecuali kalau toko besar pasti sudah tidak ada masalah," kata dia.

Kepala SMP N 5, Suharno mengatakan, penerapan sistem nontunai dalam melakukan transaksi di setiap sekolah sebaiknya dilakukan secara bertahap. Ia meyakini akan ada kendala dalam penerapannya, terutama ketika sekolah akan membeli peralatan praktik kepada penjual yang tidak memiliki rekening. Selain itu kebutuhan sekolah berbeda-beda, sehingga ia berharap aturan itu bisa menyesuaikan dengan kondisi setiap sekolah.

"Saya khawatir beli bahan praktik yang harus di penjual tidak memiliki rekening apa bisa? Itu kendala, kalau mau diterapkan harus bertahap, harus berpikir bahwa ada yang bisa dan ada yang tidak, sehingga tidak dipukul rata semua bisa," ungkap dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005